

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

Untuk menganalisis manajemen persiapan program magang luar negeri pada SMK Pusat Keunggulan, penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry. Terry merumuskan empat fungsi dasar manajemen yang dikenal dengan akronim POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).³⁵ Keempat fungsi tersebut bersifat siklus dan saling berkaitan, sehingga digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji proses manajerial di tingkat satuan pendidikan.

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan fungsi dasar untuk menetapkan tujuan organisasi dan menentukan strategi pencapaiannya secara efektif dan efisien.³⁶ Menurut Fattah, perencanaan yang baik harus mencakup penetapan tujuan yang jelas, analisis kebutuhan, penyusunan langkah-langkah konkret, serta alokasi sumber daya yang tersedia secara proporsional. Tanpa perencanaan yang matang, seluruh fungsi manajemen berikutnya akan kehilangan arah dan tolok ukur keberhasilan.

³⁵ George R. Terry, *Principles of Management*, 32.

³⁶ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Remaja Rosdakarya, 2017), 45-47.

Dalam konteks manajemen pendidikan, perencanaan yang efektif mensyaratkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan internal agar setiap dimensi program, dari aspek akademik, infrastruktur, hingga relasi eksternal, telah dipertimbangkan secara menyeluruh sejak awal. Perencanaan yang partisipatif semacam ini tidak hanya menghasilkan rencana yang lebih komprehensif, tetapi juga membangun rasa kepemilikan bersama terhadap program yang akan dijalankan.

Salah satu elemen penting dalam perencanaan program yang kompleks adalah manajemen risiko. Identifikasi risiko sejak tahap awal memungkinkan organisasi untuk merancang langkah-langkah antisipatif sebelum persoalan muncul di lapangan. Dalam konteks program kesiswaan, risiko yang perlu diantisipasi mencakup rendahnya motivasi peserta, keterbatasan kemampuan awal, hingga kemungkinan mundurnya peserta di tengah proses. Rencana yang tidak dituangkan dalam dokumen yang terukur, memuat jenis kegiatan, jadwal, penanggung jawab, dan anggaran, hanya akan berhenti sebagai niat tanpa arah. Dokumen perencanaan yang konkret sekaligus berfungsi sebagai jembatan menuju fungsi *controlling*, karena di dalamnya tersedia indikator-indikator yang kelak digunakan sebagai standar pemantauan kemajuan program.

Keterkaitan fungsi perencanaan dengan manajemen kesiswaan tampak jelas pada dua ruang lingkupnya, yaitu pencatatan dan pelaporan serta layanan bimbingan dan konseling. Arikunto

menegaskan bahwa sistem dokumentasi yang teratur dan terstruktur harus dirancang sejak awal agar seluruh proses pengelolaan peserta didik dapat dilacak secara akuntabel.³⁷ Dengan demikian, perencanaan program magang luar negeri semestinya sudah memuat rancangan instrumen pencatatan, seperti format laporan berkala, daftar kehadiran, dan dokumentasi kompetensi, sebagai bagian dari indikator kesiapan yang kelak dipantau pada tahap *controlling*. Selain itu, layanan BK idealnya turut dilibatkan sejak tahap perencanaan untuk mengidentifikasi potensi persoalan psikologis dan motivasional peserta sebelum program bergulir, sehingga intervensi pendampingan dapat dirancang secara preventif, bukan sekadar reaktif setelah persoalan muncul di lapangan.

Dalam penelitian ini, perencanaan mencakup penetapan tujuan program persiapan magang siswa luar negeri, analisis kebutuhan dan standar kompetensi DUDI luar negeri, penyusunan jadwal persiapan, perencanaan anggaran, analisis risiko, serta penetapan indikator kesiapan peserta didik. Fungsi ini menjadi dasar dalam mengarahkan seluruh sumber daya sekolah secara efektif dan terukur.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, pelimpahan wewenang, dan penetapan tanggung jawab agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, 51-61.

secara efektif.³⁸ Menurut Fattah, pengorganisasian yang efektif mensyaratkan kesesuaian antara beban tugas dengan kapasitas dan kompetensi pihak yang diberi tanggung jawab. Ketika terdapat kesenjangan antara beban tugas dan sumber daya yang tersedia, tekanan justru jatuh pada pelaksana yang harus menanggung selisihnya dengan kapasitas mandiri.

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian tidak hanya menyangkut pembagian tugas internal, tetapi juga mencakup pembangunan mekanisme koordinasi dengan pihak eksternal seperti mitra industri, lembaga pemerintah, dan orang tua peserta didik. Efektivitas kemitraan antara dunia pendidikan dan dunia industri sangat ditentukan oleh kualitas aktor yang menjadi penghubung di antara keduanya, sehingga penempatan personil yang tepat pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab jabatannya merupakan keputusan pengorganisasian yang krusial.

Aspek pengorganisasian juga bersinggungan dengan dua ruang lingkup manajemen kesiswaan, yaitu layanan bimbingan dan konseling serta pembinaan disiplin peserta didik. Penempatan personel BK ke dalam struktur tim manajemen program merupakan keputusan pengorganisasian yang penting, mengingat keterlibatan BK bersifat esensial secara pedagogis dalam program magang luar negeri, bukan sekadar pelengkap administratif. Demikian pula, pengorganisasian perlu menetapkan secara jelas pihak yang berwenang menegakkan

³⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, 62-64.

disiplin peserta, termasuk merumuskan mekanisme surat perjanjian yang mengikat peserta, orang tua, sekolah, dan lembaga mitra, agar tanggung jawab atas kepatuhan peserta tidak menjadi ambigu ketika pelatihan berlangsung di luar lingkungan sekolah.³⁹

Dalam penelitian ini, pengorganisasian diwujudkan melalui pembentukan tim manajemen program di sekolah, penetapan koordinator dan penanggung jawab, pembagian peran antara kepala sekolah, wakil kepala, guru pendamping, dan staf administrasi, serta penyusunan mekanisme koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah pusat, BP2MI, orang tua, dan DUDI luar negeri. Fungsi ini bertujuan memastikan efektivitas kerja dan kejelasan alur koordinasi antar seluruh pihak yang terlibat.

3. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan upaya mengarahkan, membimbing, dan memotivasi seluruh anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai rencana yang telah ditetapkan.⁴⁰ Terry menegaskan bahwa tanpa penggerakan yang efektif, perencanaan dan pengorganisasian yang sebaik apapun tidak akan menghasilkan tindakan nyata di lapangan. Penggerakan adalah fungsi yang paling bersentuhan langsung dengan manusia sebagai subjek utama organisasi.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, 51-61.

⁴⁰ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, 78-80.

Dalam konteks manajemen kesiswaan, penggerakan berkaitan erat dengan pembinaan dan pengembangan peserta didik serta layanan bimbingan dan konseling. Sosialisasi program yang komprehensif kepada peserta didik dan orang tua merupakan bagian dari proses orientasi yang bertujuan membangun pemahaman, kesiapan, dan komitmen yang utuh. Orientasi yang tidak lengkap berisiko menghasilkan komitmen yang rapuh dari peserta maupun keluarganya.

Selain sosialisasi, penggerakan dalam program pelatihan bertaraf internasional juga mencakup *work-based learning*, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman kerja nyata ke dalam proses pelatihan.⁴¹ Pendekatan ini tidak hanya melatih kompetensi teknis peserta, tetapi juga menanamkan etos kerja, kedisiplinan, dan budaya profesional yang sesuai dengan standar dunia kerja di negara tujuan. Melalui *work-based learning*, dimensi *match* dalam konsep *link and match* tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian kompetensi teknis, tetapi juga kesesuaian etos kerja dan budaya profesional antara peserta didik dengan lingkungan kerja yang akan dimasukinya.

Penguatan motivasi peserta juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penggerakan. Salah satu strategi yang terbukti efektif secara psikologis adalah pemanfaatan *vicarious experience*, yaitu motivasi yang bersumber dari pengalaman nyata orang lain yang

⁴¹ Naseer, F., Tariq, R., Alshahrani, H.M. et al. "Project based learning framework integrating industry collaboration to enhance student future readiness in higher education". *Scientific Reports*, Vol. 15, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-10385-4>

berada dalam posisi serupa. Bandura menjelaskan bahwa individu cenderung lebih termotivasi dan memiliki keyakinan diri yang lebih kuat ketika menyaksikan atau mendengar keberhasilan orang lain yang memiliki latar belakang dan tantangan yang sama.⁴² Dalam konteks program magang, kisah sukses alumni yang pernah berada di posisi yang sama memberikan kepada peserta didik keyakinan konkret bahwa tujuan program adalah sesuatu yang nyata dan dapat dicapai, bukan sekadar aspirasi abstrak.

Fungsi penggerakan ini pada dasarnya merupakan titik pertemuan paling intensif antara teori POAC Terry dengan tiga ruang lingkup manajemen kesiswaan Arikunto, yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik, pembinaan disiplin, serta layanan bimbingan dan konseling. Pembinaan dan pengembangan peserta didik menegaskan bahwa optimalisasi potensi siswa mencakup dimensi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan psikologis secara menyeluruh, sehingga penggerakan program magang luar negeri tidak boleh direduksi menjadi pembekalan teknis semata, melainkan harus bersifat proaktif dan terencana sejak tahap pra-pelatihan agar fondasi peserta cukup matang sebelum memasuki pelatihan inti. Pembinaan disiplin turut menjadi bagian dari penggerakan, karena disiplin dipahami bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan internalisasi tanggung jawab, konsistensi, dan etos kerja, selaras dengan penekanan *work-*

⁴² Elia Firda Mufidah, Cindy Asli Pravesti, & Dimas Ardika Miftah Farid, "Urgensi Efikasi Diri: Tinjauan Teori Bandura", *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, Vol. 3, No. 2, 2022, 30-35. <https://doi.org/10.1234/pdabkin.v3i2.148>

based learning pada penanaman etos kerja dan budaya profesional. Adapun layanan BK berperan mendampingi peserta menghadapi empat tantangan sekaligus, yaitu tantangan personal berupa adaptasi jauh dari keluarga, tantangan sosial berupa interaksi lintas budaya, tantangan akademik berupa penguasaan bahasa asing, dan tantangan karier berupa kesiapan memasuki pasar kerja internasional, sehingga penguatan motivasi melalui *vicarious experience* di atas dapat dipandang sebagai salah satu instrumen konkret dari layanan BK dalam fungsi pergerakan ini.⁴³

Dalam penelitian ini, pergerakan mencakup pelaksanaan sosialisasi program kepada peserta didik dan orang tua, seleksi berlapis yang menekankan kesiapan mental, pemberian motivasi dan penguatan karakter, pembekalan teknis, bahasa asing, dan budaya kerja, serta peningkatan kapasitas guru pendamping. Pada tahap ini terjadi proses pemberdayaan sumber daya manusia agar program berjalan secara optimal.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana melalui proses pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif yang sistematis.⁴⁴ Terry menegaskan bahwa efektivitas *controlling* sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi informasi yang diterima oleh pengambil

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, 51-61.

⁴⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, 91-93.

keputusan. Pengawasan yang sejati bukan sekadar mekanisme pelaporan, melainkan harus berujung pada Tindakan korektif yang nyata. Ketika ditemukan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang efektif dibangun di atas data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penilaian subjektif. Instrumen pengawasan dapat berupa laporan berkala, daftar kehadiran, hasil evaluasi kompetensi, maupun dokumentasi proses yang terstruktur. Dalam era digital, pemanfaatan platform berbasis teknologi sebagai sistem dokumentasi terpusat tidak hanya memenuhi tuntutan pelaporan formal, tetapi juga membangun arsip institusional yang berharga sebagai referensi untuk perencanaan program pada iterasi berikutnya. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme control sesaat, tetapi juga sebagai instrument pembelajaran institusional yang mendukung perbaikan berkelanjutan.

Fungsi controlling ini secara langsung berkorelasi dengan ruang lingkup pencatatan dan pelaporan dalam manajemen kesiswaan. Arikunto menegaskan bahwa dokumentasi yang teratur, terstruktur, dan mudah diakses, mencakup data kehadiran, catatan perkembangan kompetensi, dan hasil evaluasi, merupakan syarat akuntabilitas dan keterlacakan seluruh proses pengelolaan peserta didik; ⁴⁵ data-data tersebut pada dasarnya adalah instrumen pengawasan yang sama dengan yang disebutkan dalam fungsi controlling Terry, yaitu laporan

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, 51-61.

berkala, daftar kehadiran, dan hasil evaluasi kompetensi. Selain itu, pengawasan dalam konteks ini juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas pembinaan disiplin, misalnya melalui pemantauan kepatuhan peserta terhadap surat perjanjian yang telah disepakati, sehingga apabila ditemukan penyimpangan, sekolah dapat segera mengambil tindakan korektif sebelum berdampak pada keberlangsungan program peserta di lembaga mitra luar negeri.

Dalam penelitian ini, pengawasan mencakup pemantauan kesiapan administrasi dan kompetensi peserta didik, evaluasi efektivitas pembekalan, verifikasi kelengkapan dokumen, identifikasi kendala selama proses persiapan, serta pelaksanaan Tindakan perbaikan untuk mencapai tujuan program.

B. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK)

1. Konsep SMK PK

SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan program pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kinerja pada kompetensi keahlian tertentu. Program ini diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI), sehingga diharapkan mampu menjadi sekolah rujukan yang berperan sebagai penggerak dalam peningkatan mutu SMK lainnya.⁴⁶

⁴⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2021), 2.

SMK PK diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian, terserap di dunia kerja, serta memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dicapai melalui penyelarasan pendidikan vokasi secara sistematis dan menyeluruh dengan kebutuhan DUDI. Pada akhirnya, program SMK PK bertujuan menjadikan SMK sebagai pusat keunggulan yang tidak hanya meningkatkan kualitas internal sekolah, tetapi juga menjadi rujukan bagi pengembangan SMK lainnya.⁴⁷

2. Karakteristik Program SMK PK

Program SMK Pusat Keunggulan memiliki karakteristik yang menekankan pada keselarasan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini diwujudkan melalui penguatan kemitraan dengan DUDI dalam berbagai aspek, seperti penyelarasan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran berbasis industri, serta peningkatan kompetensi guru melalui program *upskilling* dan *reskilling*.

Selain itu, karakteristik lain dari program ini adalah penerapan pembelajaran berbasis praktik yang didukung oleh sarana dan prasarana sesuai standar industri. Program SMK PK juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran serta manajemen sekolah. Dengan karakteristik tersebut, SMK PK diharapkan mampu menghasilkan

⁴⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2021), 2.

lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun global.⁴⁸

3. Landasan Hukum SMK PK

Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) didasarkan pada berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Landasan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. Selain itu, program ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020–2024, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan.⁴⁹

4. Tujuan SMK PK

Secara umum, program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui penyelarasan pendidikan vokasi yang komprehensif dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, program

⁴⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan*, 2.

⁴⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan*, 3.

ini juga diarahkan untuk menjadikan SMK sebagai pusat peningkatan mutu serta rujukan bagi sekolah menengah kejuruan lainnya.

Secara khusus, program SMK PK memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memperkuat kemitraan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pendampingan program SMK PK.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di SMK, meliputi kepala sekolah, pengawas, dan guru, agar mampu mengelola pembelajaran dan manajemen sekolah yang berbasis kebutuhan dunia kerja.
- c. Mengembangkan kompetensi peserta didik, baik *hard skills* maupun *soft skills*, yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta membentuk karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
- d. Mewujudkan pembelajaran dan sistem penilaian berbasis data melalui penerapan manajemen berbasis sekolah.
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya fasilitas praktik yang sesuai dengan standar dunia kerja.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efisiensi pengelolaan dan pembelajaran di sekolah.
- g. Melaksanakan pendampingan berkelanjutan bagi kepala sekolah, guru, dan pengawas, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah dengan dunia kerja dalam pengembangan SMK PK.⁵⁰

⁵⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan*, 3–4.

5. Alur Pelaksanaan Program SMK PK

a. Tahap persiapan

- 1) Analisis kebutuhan sekolah dan kesesuaian dengan program SMK PK
- 2) Penetapan kompetensi keahlian yang menjadi fokus pengembangan
- 3) Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan
- 4) Persiapan sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan)
- 5) Perencanaan anggaran dan kebutuhan sarana prasarana
- 6) Penjalinan kemitraan awal dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI)⁵¹

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Pelatihan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas
- 2) Implementasi pembelajaran berbasis dunia kerja (*link and match*)
- 3) Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan DUDI
- 4) Pelaksanaan pembelajaran praktik berbasis industri
- 5) Penguatan kerja sama dengan DUDI dalam kegiatan pembelajaran

⁵¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan*, 3–4.

- 6) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana praktik sesuai standar industri
- 7) Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dan manajemen sekolah
- 8) Pelaksanaan program pengembangan kompetensi peserta didik⁵²

c. Tahap Evaluasi

- 1) Monitoring pelaksanaan program secara berkala
- 2) Evaluasi ketercapaian tujuan program
- 3) Penilaian efektivitas pembelajaran dan pelatihan
- 4) Identifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan
- 5) Penyusunan laporan pelaksanaan program
- 6) Tindak lanjut berupa perbaikan dan pengembangan program⁵³

Salah satu bentuk implementasi dari program SMK Pusat Keunggulan adalah penguatan pembelajaran berbasis dunia kerja melalui kegiatan pemagangan. Dalam perkembangannya, program pemagangan tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri, tetapi juga diarahkan ke luar negeri sebagai upaya meningkatkan kompetensi global peserta didik.

⁵² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan*, 3–4.

⁵³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Buku Saku SMK Pusat Keunggulan*, 4.

C. *Link and Match*

Menurut Wardiman Djojonegoro, konsep *link and match* merupakan keterkaitan dan kesesuaian antara proses serta hasil pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja. Istilah *link* merujuk pada keterhubungan proses pendidikan dengan kebutuhan tersebut, sedangkan *match* menunjukkan kesesuaian hasil pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, baik dari segi jumlah, kualitas, jenis, maupun waktu.⁵⁴

Dalam perkembangannya, konsep *link and match* terus diperkuat melalui berbagai kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia. Salah satu implementasinya terlihat dalam program Merdeka Belajar episode ke-8 melalui peluncuran SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa program SMK PK bertujuan memperkuat kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja agar lulusan dapat terserap serta memiliki daya saing global.⁵⁵

Implementasi konsep *link and match* dalam pendidikan vokasi diwujudkan melalui berbagai strategi, antara lain penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri, pelaksanaan praktik kerja lapangan, serta sertifikasi kompetensi peserta didik. Melalui strategi tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun global.

D. Program Pemagangan Luar Negeri

1. Konsep dan Tujuan Pemagangan

⁵⁴ Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)* (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1998), 45.

⁵⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Program SMK Pusat Keunggulan*, 6–7.

Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang dilaksanakan secara terpadu antara lembaga pelatihan dan dunia kerja melalui kegiatan praktik langsung di bawah bimbingan tenaga yang lebih berpengalaman.⁵⁶ Tujuan utama pemagangan adalah untuk membekali peserta dengan keterampilan kerja yang relevan, sehingga mampu beradaptasi dengan standar dan budaya kerja di dunia industri.⁵⁷

Dalam konteks pendidikan vokasi, pemagangan berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).⁵⁸ Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis, pembentukan etos kerja, serta penguatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini sejalan dengan prinsip *link and match* yang menekankan kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja.⁵⁹

Pada program SMK Pusat Keunggulan, pemagangan menjadi bagian dari implementasi pembelajaran berbasis industri (*work-based learning*). Dalam perkembangannya, pemagangan tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri, tetapi juga diarahkan ke luar negeri sebagai upaya meningkatkan kompetensi global peserta didik,

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 21.

⁵⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam dan Luar Negeri, Ayat 1 Pasal 1.

⁵⁸ Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B., "Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges," *Children and Youth Services Review*, Vol. 115, no. 1 (2022): 9.

⁵⁹ Pardjono Sudira, "Paradigma Baru Pembelajaran Vokasional Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Pendidikan Vokasi* Vol. 11, no. 1 (2021): 18.

khususnya dalam memahami standar kerja internasional, teknologi, serta budaya kerja lintas negara.⁶⁰

2. Regulasi Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri

Secara yuridis, penyelenggaraan pemagangan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menempatkan pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja.⁶¹ Adapun secara teknis, pemagangan luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam dan Luar Negeri.⁶²

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemagangan luar negeri harus melalui lembaga resmi yang memiliki izin, seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan mitra di luar negeri.⁶³ Selain itu, peserta magang wajib memperoleh perlindungan yang mencakup aspek keselamatan kerja, jaminan sosial, serta kepastian kepulangan.⁶⁴ Program pemagangan juga harus disusun berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di negara tujuan serta disepakati dalam perjanjian kerja sama.⁶⁵

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemagangan luar negeri memerlukan persiapan yang matang, baik dari aspek administratif,

⁶⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Program SMK Pusat Keunggulan*, 12.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, t.t.

⁶² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam dan Luar Negeri, Pasal 21.

⁶³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 25 Ayat (1), dan Pasal 26 Ayat (1).

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 30 Ayat (2).

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 27 Ayat (3).

kompetensi peserta, maupun kesiapan lembaga penyelenggara, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara aman, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.